

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DIKELURAHAN BALEHUMARA KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO

Haranansia Budiman Ponto¹

Marlien Lopian²

Ventje Kasenda³

Abstrak

Setiap upaya pembangunan sektor kelautan harus sangat sensitif terhadap budaya masyarakat, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variable utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan pada potensi dan keragaman produk kelautannya. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki di daerah itu sendiri. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat dengan maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan teknologi yang tepat guna, sehingga produk hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun peran pemerintah kelutahan dapat terlihat dari: pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sitaro melalui Pemerintah Kelurahan Balehumara ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat di Kelurahan Balehumara.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pesisir.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Balehumara merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan tagulandang, kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro yang memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, kecamatan tagulandang juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Kelurahan balehumara terletak di daerah administratif. Sumber daya perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di kelurahan balehumara. Namun potensi sumber daya laut yang cukup besar tidak dibarengi dengan kehidupan masyarakat kelurahan balehumara yang sebagian besar belum di kategorikan sejahterah. Sehingga peran pemerintah menjadi penting sebagai bentuk perhatian peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah setempat selaku pemegang kekuasaan yang lebih mengenal langsung masyarakat ini sendiri. Pembangunan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tak terkecuali masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu di dukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif pada tataan pemerintah diperlukan pemerintah yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi. Sedangkan pada tatanan masyarakat yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Paradigma pembangunan masa lalu yang beranggapan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah mengecilnya sumbangan sektor kelautan pada total pendapatan nasional.

Karena sektor kelautan merupakan lahan pemasukan yang sangat besar bagi pendapatan nasional bangsa Indonesia yang tidak dimanfaatkan atau dikelolah dengan baik oleh masyarakat. Maka untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka setiap upaya pembangunan sektor kelautan harus sangat sensitif terhadap budaya masyarakat, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variable utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan pada potensi dan keragaman produk kelautannya. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki di daerah itu sendiri. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat dengan maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan teknologi yang tepat guna, sehingga produk hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan. Oleh karena itu, kunci program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir adalah nelayan itu sendiri dengan menjadikan nelayan sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat terlaksananya tujuan dari program pemberdayaan tersebut.

Paul (Sedarmayanti, 2014:80), menyatakan bahwa: Pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah sehingga memperbesar pengaruh mereka terhadap ”proses dan hasil-hasil

pembangunan”. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No.1 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang Undang No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan asset ekonomi produktif lainnya. Dari undang-undang diatas menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan

penting dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, laut/pantai, tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya data dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola perkembangannya satu wilayah pesisir Indonesia adalah di Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang dimana sebagian masyarakatnya juga menggantungkan proses kehidupannya dari hasil laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 11 dan 12 tentang desa yakni, Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti ditemuka bahwa pemerintah Kelurahan balehumara terkesan belum maksimal melakukan perannya dalam pemberdayaan masyarakat khususnya bagi para nelayan. Hal ini dibenarkan dengan : masih kurang cukup kapasitas pemerintah kelurahan untuk memberikan motivasi, pembinaan, dan penyuluhan teknik, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait dari pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Secara gambaran umum belum

maksimalnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Balehumara yang belum dilaksanakan. Sehingga keberadaan masyarakat kelurahan khususnya, masyarakat nelayan berada pada posisi yang seakan tanpa adanya pengembangan-pengembangan dalam kehidupan mereka. Kehidupan sosial yang memaksa mereka seakan harus menerima kenyataan yang mereka hadapi. Kemiskinan yang seakan hanya menjadi takdir. Tuntutan persoalan kehidupan sehari-hari seakan membelenggu kehidupan masyarakat pesisir. Sehingga dewasa ini di butuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir. Sehingga dewasa ini dibutuhkan peran pemerintah untuk masyarakat pesisir.

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya Depdiknas (2005:34). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama Koentjaraningrat (2009:71) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Kartasmita (2005:120) menjelaskan,

upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, Karena demikian akan sudah punah. Kedua, memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini dapat diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh Karena itu hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Dengan kata lain pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampuhkan dan memandirikan masyarakat dari keadaan yang kurang mampu atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan mencapai atau memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfalisasi, mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara profesional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strateginya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Sumodiningrat (Aprillia Theresia, 2015:93), bahwa

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi perwujudan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Subejo dan Narimo 2004 (Aprillia Theresia, 2015:121), mengartikan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengolah sumberdaya lokal yang memiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, sosial.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat lain seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggudulan hutan dan pencemaran Carlos (2011:89).

Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada garis batas yang nyata, sehingga batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh situasi dan kondisi setempat. Definisi seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan

habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Menurut Bengen (2005:69), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas yaitu batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus garis pantai. Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan dan batas untuk wilayah pengaturan atau pengelolaan keseharian.

Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan. Adapun definisi definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran Aqilla (2011:78).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Balehunara Kecamatan Tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Sesuai dengan konsep dari Aprillia Theresia (2015:121) adalah, dengan aspek bagian:

1. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menggantungkan.
3. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitarnya dengan baik.
4. Melatih dan mampuhkan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya.
6. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi

dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

Informan penelitian ini adalah mereka yang dapat dijadikan sumber informasi utama mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui apakah pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan sudah berjalan dengan baik ataukah dapat menimbulkan permasalahan baru, oleh karena itu informan penelitian ini adalah:

- Lurah kelurahan balehunara
- Sekertaris Kelurahan
- 3 orang Nelayan

Hasil Penelitian

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari segolongan orang? Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang

mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh. Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda

dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah: Bagaimana memberdayakannya? Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- (a)Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.
- (b)Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat

belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

(c) Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.

Bila mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 12 pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pesisir tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan di arahkan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian pembangunan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dibutuhkan juga penguatan kelembagaan dan peningkatan fasilitas masyarakat dalam rangka pengembangan kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat. Untuk mendukung setiap program dibutuhkan kerja sama oleh setiap individu untuk mendapatkan masukan yang membangun. Pelaksanaan program dilaksanakan dalam bentuk pemilihan pelatihan pelaksanaan dan program-program oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Balehumara belum maksimal dimana dalam penyelenggaraan pemerintah Kelurahan belum ada terombosan-terombosan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat pesisir terdiri dari beberapa hal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Balehumara. Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi masyarakat memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pesisir ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Dapat dilihat dari banyaknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibentuk oleh Dinas Sosial untuk para masyarakat yang ada di setiap Kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Tagulandang seperti di Kelurahan Balehumara ini. Oleh karena

itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program ini hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari masyarakat itu sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Sekertaris Kelurahan yang mengatakan bahwa: dilihat selama ini jika ada sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, masyarakat sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut karena kegiatan ini selain dapat menambah pengetahuan juga dapat mengisi kekosongan karena kegiatannya dilaksanakan pada jam-jam yang tidak mengganggu pekerjaan ataupun istirahat para masyarakat, atau biasa juga sudah diumumkan memang pagi-pagi sebelumnya supaya masyarakat tahu kalau akan diadakan kegiatan.

Dari pernyataan tersebut di atas terlihat jelas bahwa memang di Kelurahan Balehumara ini sangat didukung oleh partisipasi masyarakatnya, melihat semua kegiatan yang telah dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun swasta sangat disambut baik dan masyarakatnya sangat antusias untuk turut serta meramaikan dan mengikuti pelatihan. Hal ini sangat mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Balehumara karena selain dapat menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, keinginan pemerintah daerah untuk memberdayakan para masyarakatnya juga dapat tercapai dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk pribadi masyarakat itu sendiri.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana di Kelurahan Balehumara merupakan salah satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu

Dinas sehingga dengan adanya sarana dan prasarana tersebut tujuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan berbagai kemudahan dan dukungan kebijakan program agar pemberdayaan yang dilakukan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan di Kelurahan Balehumara ini ke arah yang semakin lebih baik dan lebih maju kedepannya. Seperti yang dipaparkan oleh Lurah yang memaparkan bahwa kondisi sarana prasarana ini kami usahakan bisa menjadi lebih baik dari tahun ketahun. Seperti yang kita lihat sekarang telah ada jembatan beton padahal dulunya cuma jembatan gantung, jalanannya juga kami usahakan bisa aspal semua nantinya, sekolah-sekolah juga sudah bagus/layak karena telah diperbaiki bangunannya, dan juga dirumah warga sudah banyak yang mempunyai kamar mandi (wc) meskipun belum semua tetapi kami berupaya untuk membuat kamar mandi pada setiap rumah warga.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kondisi sarana prasarana di Kelurahan Balehumara ini cukup memadai karena telah banyak pembangunan-pembangunan serta pemberdayaan yang telah dilakukan dari segi perbaikan sarana prasarana setiap tahunnya meskipun belum sepenuhnya terberdaya tetapi upaya pemerintah daerah patut diacungi jempol karena memang dari tahun ketahun kelurahan ini jika di perhatikan telah mengalami perkembangan. Karena sejatinya pemberdayaan yang dilakukan itu bukan hanya masyarakat saja yang diberdayakan tetapi pemberdayaan sarana prasarana juga penting karena hal ini yang menjadi salah satu faktor

pendukung keberlangsungan pemberdayaan itu sendiri dan tentunya dapat mempermudah akses oleh pihak dinas dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat setempat.

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun peran pemerintah kelurahan dapat terlihat dari:

1. Pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sitiro melalui Pemerintah Kelurahan Balehumara ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat di Kelurahan Balehumara.
2. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sitiro sebagai upaya penyadaran atas potensi masyarakat. Semua yang terlibat dalam pelatihan ini adalah pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sitiro, dengan Pemerintah Kelurahan Balehumara.
3. Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sedemikian besar terutama disebabkan Karena berbagai macam kendala yang dihadapi terutama pada masyarakat pesisir misalnya : rendahnya kualitas SDM, keterbatasan akses pasar, sumberdaya financial, teknologi dan lain-lain.

Saran

1. Pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat pesisir/ nelayan dari hasil penelitian ini lebih

banyak ditujukan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan namun perlu diperhatikan juga terkait bagaimana kelompok ini dalam manajemen keuangan sehingga mampu untuk mandiri dan memiliki kemampuan dalam mengajukan bantuan kredit usaha ke bank.

2. Perlu diperhatikannya kendala-kendala yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat sehingga bisa dijadikan acuan dalam program berikutnya.
3. Pemerintah hendaknya memerhatikan setiap keluhan yang disampaikan dari masyarakat karena keluhan itu berupa masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat dijadikan intropeksi bagi pelaksana program itu sendiri untuk membuat program pemerintah itu lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi Komunitas :Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bengen, D.G.2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 21-22 September 2001.
- Dahuri R, J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Cetakan Keempat. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Haris, Syamsuddin, (Ed), 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta : LIPI Press.

Inderawati, 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. Berbasis Masyarakat.*

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti, 2014. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi.* Bandung: Retika Aditama.

Kusnadi, 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu: Strategi Mengatasi Kemiskinan Nelayan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aprilia Theresia, Krisna S., Andini, Prima G.P. Nugraha, Totok Mardikanto, 2005.

“Pembangunan Berbasis Masyarakat”, Bandung: Alfabeta.

Arif Satria, 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir.* Jakarta: Kerja.

Ginjar Kartasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat,* Jakarta: BAPENAS, 1996, hal:249.

Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Alfabeta

Wiranto, T. 1999. *Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah,* Cisarua.

-----, 1996. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir,* PPLH-LP, IPB. Bogor.

-----, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 2),* Jakarta: Rineka Cipta.